

## ABSTRAK

Sejak diberlakukannya undang-undang Otonomi Khusus, sistem pemerintahan provinsi Papua mengalami perubahan dalam hal kelembagaan. Kehadiran lembaga MRP sangat mempengaruhi pelaksanaan Pemerintah Provinsi Papua, terutama pada pembuatan peraturan daerah. Hubungan antara lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam setiap aktivitas kelembagaan. Dimana kerjasama yang efektif diperlukan kolaborasi dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas hubungan antara lembaga pemerintah dalam pembuatan peraturan daerah khusus (Perdapus) di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode "triangulasi" yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode ini untuk menghasilkan gambaran umum tentang fenomena yang akan diteliti. Kesimpulannya adalah efektivitas hubungan antar lembaga dari perspektif pengaturan jaringan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah cukup efektif. Dimana pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,71 (tinggi), DPRD 2,14 (sedang), dan MRP 2,33 (sedang). Komitmen dalam menjalankan tugas dan kewenangan pembuatan peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,57 (tinggi), DPRD 2,28 (sedang), dan MRP 2,16 (sedang). Sementara dari perspektif jaringan administrasi organisasi dengan indikator peran, pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,42 (tinggi), DPRD 2,28 (sedang), dan MRP 2,5 (tinggi). Nilai ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut merupakan faktor penentu dalam pembuatan peraturan daerah khusus. Indikator pelaksanaan mekanisme, pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,85 (tinggi), DPRD 2,42 (tinggi), dan MRP 2,5 (tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap institusi telah menerapkan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing institusi dalam pembuatan peraturan daerah.

**Kata kunci:** Efektivitas, *Network Governance*, Perdapus.

## ABSTRACT

Since the enactment of the Special Autonomy law, the Papuan provincial government system has undergone a change in institutional matters. The presence of MRP institutions significantly influences the implementation of the Papua Provincial Government, especially in the making of local regulation. The relationship between government institutions is necessary for every institutional activity. In which, an effective cooperation is needed in collaborating the division of tasks and functions of each government agency. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the relationship between government agencies in the formulation of special regional regulations (*PERDASUS*) in Papua Province. This research uses “triangulation” method which combines qualitative and quantitative methods. The use of this method is to produce a general overview of phenomenon of the studies. The conclusion is that the effectiveness of institutional relationship from the perspective of network arrangement shows that local government involvement is quite effective. In which, provincial government earned 2.71 (high), DPRD 2.14 (medium), and MRP 2.33 (medium). Commitment in carrying out the duties and authority of local regulation has been implemented according to the laws and regulations. The score of the provincial government is 2.57 (high), DPRD 2.28 (medium), and MRP 2.16 (medium). Meanwhile, from the perspective of organizational administrative network with role indicators, the score of the provincial government is 2.42 (high), DPRD 2.28 (medium), and MRP 2.5 (high). Those scores indicate that the three institutions are the decisive factor in the creation of special regional regulations. From the indicators of the implementation of mechanisms, the provincial government got 2.85 (high), DPRD 2.42 (high), and MRP 2.5 (high). These results indicate that each institution has implemented mechanisms by the provision in governing each agency in the drafting of local regulations.

**Keyword: Effectiveness, Network Governance, *Perdatus*.**